

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Negeri Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Dimasa Pandemi

Anida Sri Rahayu Mastur

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung

e-mail: anidasrirahayumastur@gmail.com

Abstrak, Covid-19 menimbulkan berbagai permasalahan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Dunia. Salah satu bantuan yang diberikan untuk mengurangi dampak dari adanya Covid-19 adalah Program Indonesia Pintar. Namun dalam praktiknya, di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat beberapa target yang belum tercapai berkaitan dengan program ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dimasa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan dari variable ukuran/standar kebijakan, belum sepenuhnya tercapai, namun dalam hal tujuan kebijakan sudah tercapai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. Sumberdaya manusia sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan begitupun dengan sumber daya sarana dan prasarana yang masih layak pakai. Namun untuk sumberdaya dana masih belum maksimal. Karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi namun belum bekerja dengan maksimal dikarenakan pelaksana kebijakan memiliki kesulitan dalam mengontrol penggunaan dana PIP oleh orangtua siswa dimasa pandemi Covid-19. Sikap atau kecenderungan para pelaksana memberikan respon yang positif terhadap program PIP. Komunikasi antar badan dalam organisasi sudah terorganisir dan berjalan dengan baik, begitupun komunikasi antar organisasi, namun komunikasi antara organisasi dan masyarakat khususnya dengan orangtua siswa belum berjalan dengan maksimal. Yang terakhir, lingkungan ekonomi dan sosial dari siswa dan orangtua siswa penerima PIP sangat mendukung keberhasilan implementasi PIP, begitupun juga dengan para elit politik desa yang mendukung adanya program ini.

Kata Kunci: Covid-19, Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar

Abstract, Covid-19 causes various problems not only in Indonesia but also in the world. One of the assistance provided to reduce the impact of Covid-19 is the Smart Indonesia Programme. However, in practice, at SDN Cakrataruna, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency, there are still some targets that have not been achieved related to this program. The purpose of this study is to describe the implementation of the Smart Indonesia Programme (PIP) policy at SDN Cakrataruna, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency during the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques and data collection obtained through observation and interviews with purposive sampling technique. The results of the study show that from the variable size/standard policy, it has not been fully achieved, but in terms of policy objectives, it has been achieved in accordance with the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Programme. Human resources are in accordance with the required criteria as well as facilities and infrastructure resources that are still suitable for use. However, the funding resources are still not maximized. The characteristics of implementing agents are in accordance with the main tasks and functions but have not worked optimally because policy implementers have difficulty controlling the use of PIP funds by parents during the Covid-19 pandemic. The attitude or tendency of the implementers to respond positively to the PIP program. Communication between agencies in the organization has been organized and running well, as well as communication between organizations, but communication between the organization and the community, especially with parents of students, has not run optimally. Lastly, the economic and social environment of the students and their parents who receive PIP strongly supports the successful implementation of PIP, as do the village political elites who support this program.

Keyword : Covid-19, Policy Implementation, Smart Indonesia Programme.

1. Pendahuluan

Salah satu masalah yang dihadapi negara-negara di Dunia adalah masalah kemiskinan, begitupun dengan Indonesia. Kondisi perekonomian di Indonesia ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19 ditahun 2020 yang membuat perekonomian terasa kian memburuk. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah telah memprediksi tingkat warga tidak mampu akan meningkat akibat Covid-19. Hal ini dikarenakan banyaknya warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan banyak pula pedagang kecil yang akhirnya terpaksa untuk menutup usahanya dikarenakan omset penjualannya menurun setelah adanya Covid-19. Inilah yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan karena Covid-19 dan rendahnya tingkat pendidikan juga keterampilan memperparah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.

Bantuan untuk warga yang terkena dampak dari masalah Covid-19 terus berdatangan. Bukan hanya bantuan langsung dari donator, namun juga bantuan dari pemerintah untuk dapat meminimalisir dampak dari adanya pandemi covid 19 tersebut diantaranya; Bantuan Sembako, Bantuan Social Tunai, BLT Dana Desa, Listrik Gratis, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji Karyawan, BLT Usaha Mikro Kecil dan Program Keluarga Harapan. Untuk anak yang masih berusia sekolah yang termasuk kedalam siswa miskin atau rentan miskin, pemerintah memberikan bantuan khusus yang terpisah dari program-program bantuan umum lainnya.

Seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, bahwa Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Tidak mampu dalam membiayai pendidikan dapat diilustrasikan bahwa siswa tersebut memiliki orang tua yang memiliki penghasilan kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) setiap bulannya. Dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini tentu saja kebijakan PIP ini sangat bermanfaat sekali untuk memberikan dukungan finansial bagi anak usia sekolah yang termasuk kedalam kategori miskin atau rentan miskin.

Pada kenyataannya, berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, masih terdapat berbagai penyimpangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan PIP di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sejak program ini masih memiliki nama Program Bantuan Siswa Miskin, hingga kemudian disempurnakan dengan nama Program Indonesia Pintar. Penelitian tersebut diantaranya adalah (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018), yang menyatakan bahwa ukuran dan sasaran kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun demikian, dalam hal tujuan kebijakan, penelitian dari (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) dan (Rakista, 2020) menyatakan bahwa implementasi

kebijakan sudah sesuai dengan tujuan. Dalam hal sumber daya manusia, penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia sudah sepenuhnya terpenuhi, namun dalam hal sumber daya dana, penelitian dari (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) menyatakan bahwa dana yang dikucurkan kerap kali mengalami keterlambatan. Dalam hal karakteristik agen pelaksana, penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020) menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Begitupun dengan sikap pelaksana, penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020) menyatakan bahwa pelaksana telah menerima dengan baik kebijakan dan merespon setiap keluhan dari orangtua siswa dengan baik. Selanjutnya dalam hal komunikasi, penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020) menyatakan bahwa komunikasi antar bagian dalam organisasi dan komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lusiana, 2018) menyatakan bahwa komunikasi antara organisasi dan orangtua siswa belum terlaksana dengan baik. Terakhir, dalam hal lingkungan ekonomi, social dan politik, penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) dan (Lusiana, 2018) menyatakan bahwa kondisi tersebut telah mendukung tercapainya keberhasilan dari kebijakan ini.

Selama masa pandemi Covid-19, permasalahan-permasalahan mengenai implementasi kebijakan PIP tersebut rupanya juga ditemukan di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Adapun kuota PIP yang diberikan oleh Pemerintah kepada SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya di masa pandemi covid 19 (Tahun Ajaran 2020-2021) merupakan kuota yang terbesar selama tiga tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh table 1.1

Tabel 1.
Jumlah Kuota PIP tiga tahun terakhir

No.	Tahun Ajaran	Jumlah Kuota PIP
1.	2018-2019	71 Orang
2.	2019-2020	31 Orang
3.	2020-2021	89 Orang

(Sumber: Data PIP SDN Cakrataruna)

Jumlah kuota yang berikan untuk SDN Cakrataruna di tahun ajaran tersebut adalah sebanyak 89 orang. Meskipun kuota tersebut merupakan yang terbesar, berdasarkan penelitian awal masih terdapat permasalahan dimana siswa yang dikatakan mampu mendapatkan kucuran dana PIP, sementara siswa yang termasuk kedalam kategori siswa miskin atau rentan miskin masih ada yang belum dapat menikmati kucuran dana PIP. Selain

itu, sulitnya control mengenai penggunaan dana PIP selama masa pandemi covid 19 dan penggunaan dana PIP untuk keperluan keluarga selama masa pandemi merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan PIP selama masa pandemi covid 19 di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Negeri Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dimasa pandemi dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pelaksanaan Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Negeri Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dimasa pandemi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Penelitian ini mengambil fokus dari Keberhasilan implementasi menurut teori model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn melalui enam variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana komunikasi antar organisasi, Sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi, politik.

Data primer pada penelitian ini juga diperoleh melalui observasi dan wawancara atau interview Untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian maka teknik yang digunakan adalah Purposive sampling, yaitu memilih narasumber dipandang sebagai pihak yang mengetahui tentang implementasi PIP. Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah terdiri atas; Kepala Sekolah SDN Cakrataruna, Guru Pendamping PIP SDN Cakrataruna, Operator Sekolah SDN Cakrataruna, Guru Kelas SDN Cakrataruna dan Orang Tua Murid SDN Cakrataruna

Rancangan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

SDN Cakrataruna merupakan Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Kampung Negla RT 001 RW 001 Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini resmi berdiri pada tanggal 01 Januari 1973.

Fasilitas untuk sekolah ini sudah cukup baik, dimana sekolah menggunakan sumber listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya listrik 450 watt. Selain itu, sekolah telah memiliki akses air bersih yang baik dan bersih. Untuk keperluan yang berhubungan

dengan internet atau jaringan, seperti keperluan untuk pengajuan siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), sekolah sudah memiliki sarana penunjang yaitu dengan menggunakan Telkom Speedy sebagai akses internet permanen dan Telkomsel Flash untuk akses internet alternatif.

Pada tahun ajaran 2020-2021, SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan kuota dana PIP terbesar selama tiga tahun terakhir. Hal ini juga bertepatan dengan masa pandemi Covid 19 yang telah melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020. Implementasi Kebijakan PIP SDN Cakrataruna dalam penelitian ini dapat dikaji berdasarkan beberapa variabel menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, Kondisi sosial, ekonomi, politik.

1. Sumber Daya

Dalam penelitian ini terdapat tiga sumber daya yang dikaji dalam Implementasi Kebijakan PIP SDN Cakrataruna, diantaranya: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Prasarana dan Sarana, dan Sumber Daya Dana.

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh SDN Cakrataruna bisa dikatakan masih kurang dalam hal pengadaan pembelajaran dikarenakan masih ada guru yang mengajar rangkap dua kelas, kelas I dan kelas II. Selain itu masih ada guru bidang yang merangkap sebagai guru kelas. Tetapi dalam hal pelaksanaan program PIP, personel atau implementator bisa dikatakan cukup. SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketersediaan tenaga kerja untuk melaksanakan program PIP. Meskipun tidak seluruh implementator tersebut memiliki pendidikan Strata-1, namun seluruh elemen sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tanpa adanya halangan yang berarti.

Berikut adalah table 2 yang menjelaskan tentang tugas masing-masing guru SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 2.
Spesifikasi Tugas

No	Elemen	Tupoksi
1	Kepala Sekolah	Penanggung jawab PIP
2	Guru Pendamping PIP	Mengurus administrasi ke bank, memilah dan melengkapi data siswa
3	Operator	Mendaftarkan siswa yang sesuai dengan kriteria PIP
4	Guru Kelas	Mendata siswa miskin dan rentan miskin yang ada dikelasnya

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi

Table 2 menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pihak sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan program PIP, yaitu Bapak Agus selaku kepala sekolah sebagai penanggung jawab program PIP dan juga merupakan ketua yang mengarahkan seluruh staff terkait dengan kebijakan PIP, Bapak Otan selaku guru pendamping PIP yang memiliki tugas untuk mengurus administrasi ke Bank dan mengarahkan orangtua murid untuk melengkapi data siswa berkaitan dengan keperluan pencairan dana PIP, Bapak Wili selaku Operator yang melengkapi data siswa penerima PIP di Dapodik. Sementara guru-guru lainnya yang merupakan guru kelas bertugas untuk mendata dan memilah calon-calon siswa yang memenuhi kriteria penerima PIP yang berada dikelasnya.

Dalam pemilihan pelaksana kebijakan PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sudah bisa dikatakan sesuai dengan kriteria-kriteria yang di butuhkan dan berjalan dengan baik. Misalnya saja guru yang dipilih sudah sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang diinginkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab program PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Guru yang dipilih sebagai pelaksana PIP sangat cocok dan mampu menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sebagai pelaksana PIP, misalnya untuk Operator Sekolah sudah memiliki kualifikasi yang sesuai dalam hal pendidikan yaitu S1- Teknik Informatika sehingga memiliki keahlian khusus untuk dapat memahami sistem dapodik. Selain itu, untuk Guru pendamping PIP memiliki keahlian berkomunikasi yang baik dengan orangtua ataupun dengan pihak bank dan responsive terhadap seluruh informasi yang diterima. Secara umum, pelaksana program PIP di SDN Cakrataruna tersebut benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan semestinya.

Selanjutnya, untuk sumber daya dana, Siswa miskin atau rentan miskin penerima PIP yang bersekolah di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan Rp.225.000 pertahun untuk masing-masing anak kelas I dan kelas VI, juga Rp 450.000 pertahun untuk masing-masing anak kelas II sampai V. Jumlah ini sudah bisa dikatakan cukup dan sesuai dengan kebutuhan, karena keperluan anak-anak hanya sekitar antara tas sekolah, sepatu, seragam, alat tulis sekolah dan saat pandemi ini bisa digunakan untuk membeli pulsa guna berkomunikasi dengan guru mengenai proses pembelajaran jarak jauh.

Dalam aspek sumber daya dana, pembiayaan PIP seluruhnya dibiayai oleh APBN. Pembiayaan tersebut meliputi pengadaan sarana dan prasarana, biaya operasional dan dana yang diterima oleh siswa. Menurut data cross check diantara data peserta didik dan data siswa penerima PIP, masih ada beberapa siswa miskin berpenghasilan orangtua kurang dari Rp.1.000.000,- yang belum mendapatkan PIP. Hal ini menunjukkan bahwa sumber dana dana yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya maksimal. Meskipun begitu, Dana PIP langsung diberikan pada rekening masing-masing anak sehingga hal ini menekan adanya korupsi ataupun pungutan liar. Selain hal tersebut, masih terdapat biaya lain yang belum tercover oleh pemerintah, yaitu honor khusus untuk para pelaksana kebijakan PIP. Karena

berdasarkan penelitian dan wawancara, para pelaksana PIP khususnya Operator dan Guru pendamping masih berstatus sebagai staff honorer di SDN Cakrataruna. Akan lebih baik apabila untuk pelaksana kebijakan PIP diberikan honor khusus, karena terkadang untuk biaya transportasi dan biaya percetakan harus terlebih dulu memakai uang pribadi dari para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dana masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat siswa miskin yang belum mendapatkan kucuran dana PIP dan juga masih terdapat biaya-biaya yang belum tercover oleh pemerintah.

Dalam Implementasi kebijakan disamping membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan dana dibutuhkan juga sumber daya peralatan. Peralatan yang dimaksud mencakup sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Tabel 1.3
Daftar Prasarana dan Sarana

No	Uraian	Jml	Kondisi
1.	Ruang Guru	1 unit	Baik
2.	Kursi Guru	1 unit	Baik
3.	Meja Guru	1 unit	Baik
4.	Papan Tulis	1 unit	Baik
5.	Laptop Lenovo V130	1 unit	Baik
7.	Printer Epson L120	1 unit	Baik

Sumber: Hasil Pengamatan

Prasarana dan Sarana yang berada di SDN Cakrataruna Kab. Tasikmalaya secara keseluruhan cukup memadai sehingga dapat menjalankan pelayanan administrasi PIP dengan baik. Begitupun dengan aspek sumber daya peralatan layanan administrasi PIP SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sudah tersedia secara semestinya. Terlebih bila ke depan dilakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sebagaimana mestinya. Jika ditahun-tahun sebelumnya dibutuhkan ruangan untuk menampung orangtua siswa ketika dilakukan sosialisasi mengenai PIP, ditahun ajaran 2020-2021 ruang kelas dan seluruh peralatan penunjangnya tidak diperlukan untuk implementasi kebijakan PIP dikarenakan tidak ada sosialisasi di sekolah untuk menghindari adanya kerumunan banyak orang.

2. Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam penentuan agen pelaksana, SDN Cakrataruna memiliki kriteria-kriteria yang diharus dipertimbangkan agar implementasi program PIP dapat berjalan dengan lancar. Para agen pelaksana program PIP harus benar-benar mengerti betul tentang keadaan

tempat tinggal siswa dan kondisi siswa, sehingga dalam penentuan siswa yang berhak mendapat PIP bisa maksimal. Terdapat 4 pihak yang sangat berperan penting dalam pencapaian keberhasilan program PIP terutama dalam penentuan calon penerima PIP. Bapak Agus selaku kepala sekolah sebagai penanggung jawab program PIP dan juga merupakan ketua yang mengarahkan seluruh staff terkait dengan kebijakan PIP, Bapak Otan selaku guru pendamping PIP yang memiliki tugas untuk mengurus administrasi ke Bank dan mengarahkan orangtua murid untuk melengkapi data siswa berkaitan dengan keperluan pencairan dana PIP, Bapak Wili selaku Operator yang melengkapi data siswa penerima PIP di Dapodik. Ketiga pelaksana kebijakan tersebut merupakan orang asli yang bertempat tinggal di Desa Tenjonagara, sehingga para pelaksana dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi dari siswa dan tempat tinggal siswa tersebut. Sementara guru-guru lainnya yang merupakan guru kelas bertugas untuk mendata dan memilah calon-calon siswa yang memenuhi kriteria penerima PIP yang berada dikelasnya. Tetapi, dimasa pandemi ini ada kesulitan dalam hal mendukung kesuksesan dari tujuan PIP yaitu, sulitnya control yang dilakukan terhadap penggunaan dana PIP. Jika biasanya guru dengan mudah dapat melihat secara langsung apakah seragam atau sepatu anak didik sudah diganti yang baru setelah PIP turun, masa pandemi membuat hal tersebut sulit untuk dilakukan, dikarenakan murid belajar di rumah dan tidak mengenakan seragam ataupun sepatu, sehingga sulit dilakukan control atas kebijakan PIP tersebut.

Karakteristik agen pelaksana organisasi terhadap implementasi PIP sudah baik, namun belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan kondisi yang saat ini bisa dikatakan belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian Tupoksi yang dilaksanakan oleh para guru dan Kepala Sekolah dalam hal implementasi PIP. Dari mulai sosialisasi mengenai PIP yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengumpulan persyaratan untuk pengajuan PIP, hingga mendampingi orang tua siswa saat pencairan di Bank, semua itu telah dilaksanakan dengan baik dan seperti semestinya. Namun juga dikatakan belum maksimal dikarenakan sulitnya control organisasi sekolah atas penggunaan PIP yang dilakukan oleh orangtua siswa.

3. Komunikasi

Dalam hal komunikasi, yang pertama kali diamati adalah Komunikasi antar bagian dalam organisasi, karena hal tersebut sangat penting untuk menunjang implementasi PIP. Dalam hal komunikasi antar-bagian dalam organisasi harus terkoordinasi dengan sebaik mungkin, agar masing-masing dari pihak pelaksana dapat mengetahui tugas mereka masing-masing. Komunikasi antar bagian dalam organisasi SDN Cakrataruna sudah terorganisasi dengan baik. Koordinasi diantara para guru dan kepala sekolah untuk membahas PIP selalu dilakukan setiap kali akan pencairan. Di masa pandemi sekarang ini, komunikasi antar bagian dalam organisasi lebih banyak dilakukan melalui media social atau daring dengan

menggunakan aplikasi whatsapp. Namun sesekali terkadang dilakukan juga melalui tatap muka tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Selain komunikasi antar bagian dalam organisasi, komunikasi dan kerjasama antar organisasipun diperlukan untuk mempermudah proses implementasi PIP dari mulai mendataan hingga pencairan. Dalam hal ini, organisasi yang bekerja sama dengan SDN Cakrataruna adalah Petugas Desa Lengkongjaya dan petugas di Bank BRI Unit Nangerang.

Komunikasi antara Organisasi SDN Cakrataruna dengan Petugas Desa Lengkongjaya sudah berlangsung dengan baik, meski tidak dilakukan secara langsung, namun pihak orangtua membutuhkan dukungan dari pihak desa berkenaan dengan beberapa persyaratan atau kelengkapan data dari desa berkaitan dengan pencairan dana PIP. Selain itu, ada yang dinamakan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang mana kartu ini hanya dikeluarkan oleh pihak desa. Setiap anak yang memiliki KIP sudah dipastikan akan mendapatkan kucuran dana PIP, begitupun dengan siswa yang terdaftar sebagai anak yatim/ piatu sudah dipastikan akan mendapatkan dana PIP tanpa harus diajukan oleh pihak sekolah.

Begitupun dengan Petugas Bank BRI Unit Nangerang, komunikasi sudah terkoordinasi dengan baik, bahkan saling memberikan nomor ponsel agar ketika jadwal pencairan bisa saling menghubungi.

Masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam hal ini sebagai objek dari implementasi PIP tentunya harus memiliki komunikasi yang baik dengan pihak Organisasi di Sekolah. Komunikasi mengenai PIP disosialisasikan melalui rapat orang tua. Pada saat sosialisasi tersebut, orang tua murid mendapatkan selebaran mengenai PIP dan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Dalam selebaran tersebut tercantum misi dari Program Indonesia Pintar dan juga dituliskan berapa nominal dana yang disalurkan pada siswa miskin dalam setiap semesternya. Dimasa pandemi seperti sekarang ini, sosialisasi mengenai PIP dan pemberitahuan mengenai pencairan PIP lebih sering dilakukan dengan menggunakan sambungan telepon atau didatangi langsung ke rumah masing-masing (door to door) untuk menginformasikannya.

Namun meskipun komunikasi antara pihak sekolah dan orangtua murid sudah dilaksanakan dengan baik, pada kenyataannya dimasa pendemi seperti saat ini ada orang tua siswa yang masih menggunakan dana PIP diluar kebutuhan sekolah meski sudah dilakukan sosialisasi. Jika biasanya dana PIP digunakan untuk membeli keperluan sekolah seperti seragam, sepatu, tas dan alat tulis, di masa pendemi ini, siswa tidak membeli seragam, sepatu, tas dan hanya membutuhkan alat tulis saja untuk menunjang pembelajaran yang dilakukan dari rumah, sementara kebutuhan rumah tangga semakin sulit dan lebih diperlukan untuk menunjang kehidupan. Orangtua siswa beralasan meskipun tidak digunakan untuk kepentingan sekolah, namun dana PIP tetap digunakan untuk kebutuhan anak didalam rumah tangga, seperti kebutuhan pokok, berupa makanan dan gizi anak ataupun untuk keperluan peralatan mandi yang digunakan oleh anak juga. Sementara untuk kuota pembelajaran telah diberikan oleh Kemendikbud, meski ada juga orang tua yang

menggunakan dana PIP untuk pulsa, dikarenakan tidak seluruh orangtua siswa memiliki ponsel pintar.

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Organisasi SDN Cakrataruna sudah efektif dalam komunikasi antar bagian dalam organisasi dan komunikasi antar organisasi. Namun dalam hal komunikasi antar organisasi dan masyarakat masih ada beberapa orang tua murid yang belum melaksanakan penggunaan dana PIP sebagaimana mestinya meskipun sudah dilakukan sosialisasi.

4. Sikap Para Pelaksana

Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap dari pelaksana yang berarti bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan seberapa antusias dan responsive pelaksana kebijakan terhadap kelompok sasaran dan lingkungan. Para agen pelaksana bisa memberikan sikap penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan. Di SDN Cakrataruna sendiri, para agen pelaksana sudah menerima program implementasi PIP, bahkan berusaha untuk menjalankannya dengan sebaik mungkin.

Guru SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan mereka juga menyambut baik adanya Program Indonesia Pintar. Terlebih disaat pandemi covid 19 bantuan dari PIP ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dari siswa miskin atau rentan miskin, dimana proses kegiatan belajar mengajar sulit untuk dilakukan secara langsung. Sehingga terkadang guru kelas melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pesan singkat (sms) ataupun whatsapp. Kegiatan belajar mengajar yang tadinya gratis dan tidak membutuhkan biaya, kini diharuskan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli pulsa ataupun kuota. Meskipun Kemendikbud telah menggelontorkan dana untuk pembelian kuota belajar untuk siswa, namun pada kenyataannya, masih banyak siswa yang tidak memiliki ponsel pintar, sehingga mereka lebih membutuhkan dana PIP untuk membeli pulsa guna kepentingan pembelajaran jarak jauh.

Selain itu, dalam hal respon, para pelaksana sudah merespon informasi mengenai kebijakan PIP dengan sangat baik dan merespon dengan baik setiap keluhan yang datang dari orangtua siswa yang tidak menerima kucuran dana PIP. Bahkan para pelaksana inilah yang mengusahakan agar seluruh siswa miskin dan rentan miskin dapat menerima kucuran dana PIP dan memastikan bahwa orangtua siswa melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan baik untuk pengajuan PIP ataupun persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan di Bank.

Pelaksanaan program PIP di SDN Cakrataruna mendapat respon yang positif dari guru dan siswa SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Para agen pelaksana di sekolah mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program PIP sesuai dengan deskripsi pekerjaannya masing-masing.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sesuai dengan tujuannya, pendanaan PIP memang dikhususkan untuk siswa yang kurang mampu. Tidak mampu dalam membiayai pendidikan dapat diilustrasikan bahwa siswa tersebut memiliki orang tua yang memiliki penghasilan kurang dari UMR setiap bulannya. Berikut ini merupakan data penghasilan orangtua siswa SDN Cakrataruna tahun ajaran 2020-2021.

Tabel 4.
Penghasilan Orang Tua Siswa (Tahun Ajaran 2020-2021)

No	Penghasilan Orangtua (Ayah)	Total	Penerima PIP	Penerima PIP dua kali
1.	Tidak berpenghasilan/ wafat	3	3	
2.	Kurang dari Rp. 500,000	80	77	5
3.	Rp. 500,000 - Rp. 999,999	4	1	
4.	Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999	3	1	
5.	Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999	7	2 (piatu)	
6.	Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000	3	0	
7.	Lebih dari Rp. 20,000,000	0	0	
	Total	100	84	84+5= 89

Sumber: Data SDN Cakrataruna

Berdasarkan data yang didapatkan dari table 4, dapat dilihat bahwa terdapat orangtua tiga siswa yang dituliskan tidak berpenghasilan. Hal tersebut dikarenakan ketiga siswa tersebut merupakan anak yatim. Dalam hal ini, pemerintah telah tanggap untuk memberikan bantuan terhadap ketiga siswa tersebut. Sehingga ketiga siswa tersebut seluruhnya mendapatkan bantuan dana PIP. Hal lain yang tampak dari table tersebut adalah mayoritas orangtua siswa memiliki penghasilan dibawah UMR. Bahkan, 80% diantaranya memiliki penghasilan dibawah Rp 500.000,-. Minimnya pendapatan yang diperoleh orang tua siswa, mengakibatkan siswa sulit untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Ketidak seimbangannya antara mahalnya kebutuhan hidup dengan pendapatan orang tua siswa menjadi pemicu utama siswa sulit untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Jika dilihat dari penghasilan orang tua siswa perbulan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Selain itu, imbas dari pandemi covid 19 membuat perekonomian dari keluarga siswa menjadi lebih buruk lagi. Jika biasanya orangtua siswa dapat bekerja serabutan, setelah adanya covid 19 banyak usaha sampingan yang terpaksa harus terhenti.

Pihak sekolah telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, SDN Cakrataruna telah mendapatkan kuota PIP yang sangat besar ditahun ajaran 2020-2021 dengan total penerima dana PIP dalam satu periode sebesar 84% dari total seluruh siswa.

Lingkungan ekonomi yang mendukung dengan adanya mayoritas orangtua siswa memiliki penghasilan dibawah UMR, membuat kebijakan PIP ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang menginginkan pemerataan pendidikan di SDN Cakrataruna.

Berbicara mengenai lingkungan sosial berarti berbicara mengenai keadaan sosial orang tua siswa atau siswa di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Keadaan social dari orangtua (ayah) siswa di SDN Cakrataruna sebagian besar berprofesi sebagai buruh sekitar 44%, wiraswasta 33%, PNS 8%, karyawan swasta 7%, pedagang kecil 3% dan tidak bekerja sebanyak 5%.

Pekerjaan yang didominasi oleh buruh dengan upah yang tidak menentu dan cenderung dibawah UMR, membuat para orang tua dan siswa sangat mendukung adanya program PIP tersebut. Orang tua siswa dan siswa merasa bahwa dengan adanya program PIP tersebut dapat membantu meringankan beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan siswa, terlebih disaat pandemi. Bahkan saking bersemangatnya, ada beberapa orangtua murid yang sering bertanya kapan kira-kira dana PIP akan turun dan bertanya-tanya jika kebetulan anaknya belum mendapatkan dana PIP. Namun dalam hal persyaratan, orangtua cenderung agak lamban dalam mengumpulkan persyaratan, padahal persyaratan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan rekening atau untuk pencairan dana PIP. Hal ini disebabkan karena ada beberapa siswa yang tidak tinggal bersama orangtuanya dan hanya tinggal bersama wali. Sehingga untuk kelengkapan berkas harus menunggu dikirimkan oleh orangtua siswa yang memiliki tempat tinggal di luar kota. Meskipun begitu, penyerahan persyaratan tidak pernah melewati waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak ada halangan dalam hal keberhasilan program PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan adanya dukungan dan partisipasi dari orang tua siswa dan siswa terhadap program PIP tersebut, maka program PIP dapat berjalan dengan baik. Mengingat partisipasi dari orang tua siswa penerima PIP sangat mempengaruhi berhasil tidaknya program PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

Unsur politik dalam pelaksanaan program PIP saat ini sangat mempengaruhi keberhasilan program PIP. Dalam pelaksanaan program PIP, elite politik ditingkat desa mendukung supaya anak-anak dapat melengkapi kebutuhan sekolahnya, sehingga tidak mempersulit pengurusan kelengkapan persyaratan menerima PIP.

Dalam unsur lingkungan ekonomi, mayoritas orangtua siswa memiliki penghasilan dibawah UMR, membuat kebijakan PIP ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang menginginkan pemerataan pendidikan di SDN Cakrataruna. Dalam unsur sosial, orang tua siswa sangat antusias menyambut kebijakan PIP. hal ini dikarenakan kucuran dana PIP dapat meringankan beban orang tua dalam hal biaya keperluan pendidikan. Perangkat desa sangat mendukung kegiatan PIP, dibuktikan dengan cara kerja mereka yang cepat tanggap memenuhi persyaratan kelengkapan data untuk para siswa miskin.

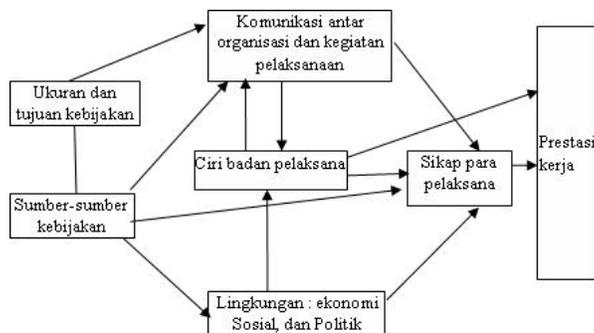
Program PIP dapat terealisasi dengan baik jika seluruh elemen dapat terkoordinasi dengan baik. Baik itu pihak Sekolah, Desa, Bank dan Orangtua siswa

b. Pembahasan

Carl J. Freindrich dalam (Rusli, Kebijakan Publik, 2015) mengemukakan bahwa Kebijakan adalah suatu tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan/pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan tantangan-tantangan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita/mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu. Salah satu cita-cita yang diharapkan oleh pemerintah dimasa pandemi ini adalah memastikan bahwa siswa miskin atau rentan miskin tetap dapat melanjutkan pendidikannya dengan lancar tanpa harus terganggu oleh permasalahan-permasalahan ekonomi yang merupakan dampak dari adanya pandemi covid 19. Karena itulah pemerintah mengucurkan kuota PIP yang lebih banyak pada tahun ajaran 2020-2021 dengan harapan dapat membantu siswa miskin dalam mengenyam pendidikan.

Salah satu sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan kucuran dana PIP adalah SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, dengan adanya bantuan dana PIP tersebut diharapkan dapat membantu siswa di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya.

Kegiatan implementasi PIP memerlukan panduan untuk menilai serta mengamati secara jelas bagaimana pelaksanaan program tersebut. Panduan tersebut berupa teori dalam penelitian ini yang menggunakan enam variabel implementasi kebijakan yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan konsep model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Dimana variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang terkait antara variabel yang satu dengan yang lain, hubungan antar variabel tersebut digunakan untuk menganalisis suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi program PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dianalisis berdasarkan hubungan keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn.



Gambar 1.1

Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) Sumber: (Kusnandar, 2014)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan haruslah memiliki standar dan sasaran tertentu. Ukuran dan tujuan kebijakan pada dasarnya apa yang hendak ingin dicapai oleh kebijakan. Baik yang berwujud atau tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan (Sujatmiko & Rosdiana, 2014)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:447) dalam (Rusli, Kebijakan Publik, 2015), Standar dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang tengah dijalankan.

Suatu kebijakan dirasa tepat jika tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah yang ada, Riant Nugroho (2014: 686) dalam (Riqi & Yuniningsih, 2017) . Apakah Kebijakan Program Indonesia Pintar dapat membiayai kebutuhan personal dan diharapkan mampu membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop out) (Riqi & Yuniningsih, 2017).

Tujuan dari kebijakan ini harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan Disini tujuan pelaksanaan kebijakan PIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. Berdasarkan penuturan dari Kepala Sekolah SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, seratus persen siswa usia sekolah dasar di Kampung Negla Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang sudah mengenyam pendidikan dasar di SDN Cakrataruna, yang berarti bahwa tujuan dari program ini bisa dikatakan sudah berhasil.

Implementasi PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mempunyai ukuran tertentu agar program PIP bisa dicapai sesuai dengan target. Target atau sasaran dalam program PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya adalah Para Pelaksana kebijakan mengetahui siapa-siapa saja kriteria yang berhak untuk mendapatkan dana PIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. Selain itu, target atau sasaran lainnya adalah pihak sekolah berusaha agar dana PIP bisa tersalur kepada siswa yang benar-benar berhak menerima dana PIP (tepat sasaran) dan dana PIP tersebut benar-benar dipakai untuk keperluan sekolah, sesuai tujuan asalnya yaitu, mendukung pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ukuran pelaksanaan PIP masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, seperti dalam hal siswa penerima PIP yang belum tepat sasaran dan dana PIP tidak dipergunakan untuk keperluan sekolah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) dan (Lusiana, 2018) yang menyatakan bahwa ukuran dan sasaran kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Tetapi hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rakista, 2020) yang menyatakan bahwa sasaran dari kebijakan PIP sudah tercapai. Meskipun ukuran pelaksanaan PIP belum tercapai, namun untuk tujuan pelaksanaan PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sudah tercapai dengan maksimal sesuai dengan pedoman, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) dan (Rakista, 2020) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sudah sesuai dengan tujuan.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resources). Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Rusli, Kebijakan Publik, 2015), Sumber daya merujuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik dan dapat menjelaskan nilai yang efisien.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material, dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien (Lusiana, 2018). Dalam hal ini terdapat tiga sumber daya yang dikaji dalam Implementasi Kebijakan PIP SDN Cakrataruna, diantaranya: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Prasarana dan Sarana, dan Sumber Daya Dana.

Sumber Daya Manusia dalam hal pelaksanaan Implementasi Kebijakan tentang Program Indonesia Pintar juga memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa sumber daya manusia

yang memadai maka proses mekanisme dari pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar akan sangat terhambat (Suparman, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Sumberdaya manusia sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan begitupun dengan sumber daya sarana dan prasarana yang masih layak pakai. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020). Namun untuk sumberdaya dana masih belum maksimal karena masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan bantuan dan masih ada biaya lainnya yang belum tercover oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) ataupun (Rakista, 2020).

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan juga di pengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana kebijakan. Karakteristik badan pelaksana tersebut akan menentukan tentang bagaimana kebijakan akan dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn dalam (Rusli, Kebijakan Publik, 2015) menyatakan bahwa karakteristik badan pelaksana menunjuk seberapa besar daya dukung organisasi yang mendapat dukungan dari struktur (sumber daya) organisasi, nilai-nilai (budaya) yang berkembang dalam organisasi, hubungan dan interaksi komunikasi internal organisasi dalam birokrasi.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya (Riska & Rostyaningsih, 2018).

Karakteristik agen pelaksana organisasi terhadap implementasi PIP sudah baik, namun belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan kondisi yang saat ini bisa dikatakan belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian Tupoksi yang dilaksanakan oleh para guru dan Kepala Sekolah dalam hal implementasi PIP. Dari mulai sosialisasi mengenai PIP yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengumpulan persyaratan untuk pengajuan PIP, hingga mendampingi orang tua siswa saat pencairan di Bank, semua itu telah dilaksanakan dengan baik dan seperti semestinya. Namun juga dikatakan belum maksimal dikarenakan sulitnya control organisasi sekolah atas penggunaan PIP yang dilakukan oleh orangtua siswa. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020) dikarenakan ketiga penelitian tersebut tidak dilaksanakan ketika masa pandemi Covid-19.

4. Komunikasi

Aspek penting bagi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu adanya komunikasi, karena komunikasi merupakan proses penyampaian informasi atau pesan yang dilakukan oleh sesama aktor kebijakan/ implementor (Rakista, 2020). Menurut Agustino

(2006:157) dalam (Rusli, Kebijakan Publik, 2015), Komunikasi merupakan salah satu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Sementara (Kusnandar, 2014) menyatakan bahwa komunikasi menunjukkan peranan penting sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui secara tepat apa yang akan mereka kerjakan. komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi yang terkait dalam implementasi program PIP ini adalah antar bagian dalam organisasi, komunikasi antarorganisasi dan Komunikasi antara organisasi dan masyarakat.

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi menentukan keberhasilan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, jika pembuat dan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Implementasi suatu kebijakan akan berjalan dengan efektif jika tidak ada disorientasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Sehingga pelaksana kebijakan harus mengetahui apa tujuan dan mekanisme kegiatan yang dilakukan serta menginformasikannya kepada kelompok sasaran (Machdum, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Organisasi SDN Cakrataruna sudah efektif dalam komunikasi antar bagian dalam organisasi dan komunikasi antar organisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020) menyatakan bahwa komunikasi antar bagian dalam organisasi dan komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik.

Namun dalam hal komunikasi antar organisasi dan masyarakat masih ada beberapa orang tua murid yang belum melaksanakan penggunaan dana PIP sebagaimana mestinya meskipun sudah dilakukan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lusiana, 2018) dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) dan (Rakista, 2020).

5. Sikap Para Pelaksana

Variabel lain yang juga mempengaruhi prestasi kebijakan secara langsung yaitu sikap dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan atau implementator harus memiliki kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers). Jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh seperti yang diharapkan pembuat kebijakan (Sartika et al., 2017), ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif (Pertwi & Rengga, 2015). Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana untuk menerapkan suatu kebijakan agar

implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat bersesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahamannya setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan (Sartika et al., 2017). Dengan adanya disposisi para implementor dituntut untuk selalu berkomitmen dan memiliki sifat demokratis guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan (Sofianty et al., 2014).

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam (Rusli, Kebijakan Publik, 2015), yang menyatakan bahwa sikap pelaksana menunjuk pada seberapa besar demokratis, antusias dan responsive sikap pelaksana terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.

Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap dari pelaksana yang berarti bahwa sikap pelaksana menjadi *variable* penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan seberapa antusias dan responsive pelaksana kebijakan terhadap kelompok sasaran dan lingkungan. Para agen pelaksana bisa memberikan sikap penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan. Di SDN Cakrataruna sendiri, para agen pelaksana sudah menerima program implementasi PIP, bahkan berusaha untuk menjalankannya dengan sebaik mungkin.

Pelaksanaan program PIP di SDN Cakrataruna mendapat respon yang positif dari guru dan siswa SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Para agen pelaksana di sekolah mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program PIP sesuai dengan deskripsi pekerjaannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020) yang menyatakan bahwa pelaksana kebijakan telah menerima dengan baik kebijakan dan merespon setiap keluhan dari orangtua siswa dengan baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Pada model implementasi Van Matter dan Van Horn, menyatakan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi karakter badan pelaksana dan sikap para pelaksana. Keadaan social-ekonomi, politik, dukungan public maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan public. Kondisi social ekonomi sebuah masyarakat yang maju, system politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Dalam unsur lingkungan ekonomi, mayoritas orangtua siswa memiliki penghasilan dibawah UMR, membuat kebijakan PIP ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang menginginkan pemerataan pendidikan di SDN Cakrataruna. Dalam unsur sosial, orangtua siswa sangat antusias menyambut kebijakan PIP. hal ini dikarenakan kucuran dana PIP

dapat meringankan beban orang tua dalam hal biaya keperluan pendidikan. Perangkat desa sangat mendukung kegiatan PIP, dibuktikan dengan cara kerja mereka yang cepat tanggap memenuhi persyaratan kelengkapan data untuk para siswa miskin. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) dan (Lusiana, 2018) yang menyatakan bahwa lingkungan ekonomi, social dan politik telah mendukung tercapainya keberhasilan dari kebijakan ini.

Program PIP dapat terealisasi dengan baik jika seluruh elemen dapat terkoodinasi dengan baik. Baik itu pihak Sekolah, Desa, Bank dan Orangtua siswa.

4. Kesimpulan

Keberhasilan implementasi program PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang dianalisis melalui teori Van Metter dan Van Horn dalam penelitian ini dapat disimpulkan sudah berjalan akan tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terlihat dari ukuran atau target yang ingin dicapai masih belum memenuhi target. Namun, meskipun demikian, untuk tujuan pelaksanaan PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sudah tercapai sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.

Sumberdaya manusia sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan begitupun dengan sumber daya sarana dan prasarana yang masih layak pakai. Namun untuk sumberdaya dana masih belum maksimal. Karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi namun belum bekerja dengan maksimal. Sementara itu, Sikap atau kecenderungan para pelaksana memberikan respon yang positif terhadap program PIP.

Komunikasi antar badan dalam organisasi sudah terorganisir dan berjalan dengan baik, begitupun komunikasi antar organisasi, namun komunikasi antara organisasi dan masyarakat khususnya orangtua siswa belum berjalan dengan maksimal dimasa pandemi karena masih adanya kesalahan orangtua dalam penggunaan dana PIP. Yang terakhir, lingkungan ekonomi dan sosial dari siswa dan orangtua siswa penerima PIP sangat mendukung keberhasilan implementasi PIP, begitupun juga dengan para elit politik desa yang sangat mendukung adanya program ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Kusnandar, I. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Multazam.
Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera.
Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Artikel Jurnal di Internet

- Lusiana, L. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013). *EJournal Administrasi Negara*, 6(1), 6991–7005.
- Machdum, M. S. V. (2020). Potensi Pendukung Pelaksanaan Program Indonesia Pintar: Studi Kasus di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(2), 139–154.
- Pertiwi, Y. M., & Rengga, A. (2015). Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar Negeri (SD) di Jakarta Timur Wilayah II. *Universitas Diponegoro*.
- Rakista, P. M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224–232.
- Riqi, E. A. A., & Yuniningsih, T. (2017). Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Universitas Diponegoro*.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29792>
- Riska, I. A., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus. *Journal Policy And Management Review*, 7(2).
- Sartika, Safitri, D. P., & Edison. (2017). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Kota Tanjungpinang. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Sofianty, W., Suryaningsih, M., & Marom, A. (2014). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP di Kota Semarang (Studi Pada SMP Negeri 27 Semarang). *Universitas Diponegoro*.
- Sujatmiko, K. O., & Rosdiana, W. (2014). Implementasi Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. *Universitas Negeri Surabaya*.
- Suparman, E. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(2), 18–26.

Dokumen

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Website

(BPS), B. P. (2020). *Presentase Penduduk Miskin September 2020*. <https://www.bps.go.id>.

Nasional, K. (2020). *Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan*.
<http://www.nasional.kompas.com>